



# Pengaruh Ketepatan Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bidik Inovasi Global

Sukma Asri<sup>1\*</sup>, Rheinata Audreyana Missel<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[1222200164@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200164@surel.untag-sby.ac.id), [1222200191@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200191@surel.untag-sby.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan swasta, berdasarkan observasi langsung selama masa magang di Divisi Activation. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ketepatan pelaporan dengan respons manajerial dalam menilai kinerja divisi. Hasil observasi menunjukkan bahwa LPJ yang diajukan tepat waktu berkontribusi pada efisiensi proses analisis keuangan, memperkuat kredibilitas divisi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan menyebabkan gangguan dalam ritme evaluasi dan menurunkan kepercayaan manajemen. Faktor budaya kerja, sistem dokumentasi, serta integrasi administrasi perpajakan menjadi penentu utama ketepatan LPJ. Oleh karena itu, ketepatan pelaporan tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme dan tata kelola keuangan yang sehat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang disiplin dan terstruktur dalam mendukung akuntabilitas organisasi.

**Kata Kunci:** Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Pajak, Manajemen Keuangan, Manajemen Risiko

## PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi dan tuntutan transparansi keuangan yang semakin ketat, perusahaan swasta di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan. Setiap bulannya, ribuan perusahaan berlomba-lomba memenuhi deadline pelaporan pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, namun tidak sedikit yang mengalami hambatan dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akibat ketidakteraturan dalam administrasi pajak.

Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa 60% perusahaan swasta mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, dan sebagian besar disebabkan oleh masalah rekonsiliasi data pajak yang tidak tertib. Ketika pelaporan pajak dilakukan dengan tidak tepat waktu atau tidak akurat, efek dominonya langsung terasa pada proses penyusunan LPJ yang menjadi terhambat, memakan waktu lebih lama, dan berpotensi menimbulkan kesalahan material.

Permasalahan ini bukan hanya sekedar urusan administratif semata, melainkan berdampak langsung pada kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. Investor, auditor eksternal, dan regulator semakin memperhatikan kualitas pelaporan keuangan sebagai indikator kesehatan dan profesionalisme perusahaan. Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam LPJ dapat memicu keraguan tentang sistem pengendalian internal perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan investasi dan penilaian risiko.

Ironisnya, banyak perusahaan belum menyadari bahwa akar masalah kelancaran proses LPJ sebenarnya terletak pada sistem dan ketepatan pelaporan pajak mereka. Ketika dokumen-

dokumen pajak seperti SPT, faktur pajak, dan bukti potong pajak dikelola dengan baik dan dilaporkan tepat waktu, proses rekonsiliasi untuk LPJ menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Sebaliknya, ketidakteraturan dalam aspek perpajakan akan menciptakan bottleneck yang menghambat seluruh alur pelaporan keuangan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris tentang seberapa besar pengaruh ketepatan pelaporan pajak terhadap efisiensi proses LPJ di perusahaan swasta. Dengan memahami korelasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan sistem administrasi pajak mereka tidak hanya untuk compliance, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas corporate governance dan transparansi keuangan yang menjadi tuntutan era modern.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Agency (Teori Keagenan)

Teori ini mendefinisikan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), dimana agen diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengatur, mengatur, dan mengelola beberapa jasa untuk kepentingannya (Agustina, I., Titisari, K. H., & Mursito, B. (2024)). Dalam hubungan ini, sering kali muncul ketidakseimbangan informasi karena agen menguasai lebih banyak data operasional dibandingkan prinsipal. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi penyimpangan jika tidak diiringi dengan mekanisme pelaporan yang transparan dan akurat.

Dalam praktiknya, pengajuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan secara tepat waktu menjadi alat penting untuk memperkecil celah ketidaktahuan antara prinsipal dan agen. Ketika laporan disusun dengan cermat dan diajukan sesuai jadwal, hal ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme agen, tetapi juga memperkuat kepercayaan prinsipal terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pelaporan dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas kinerja. Oleh karena itu, ketepatan LPJ memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi atas kualitas pengelolaan keuangan dan menjadi tolak ukur penting dalam proses evaluasi kinerja secara keseluruhan.

### Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam sebuah perusahaan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas –tugas terhadap publik sesuai dengan prinsip yang ada (Nasution, N., & Hanum, Z. (2024)). Dalam tataran praktis, konsep good governance sangat berperan dalam mengarahkan bagaimana LPJ seharusnya disusun dan digunakan dalam proses evaluasi keuangan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Di banyak organisasi, penerapan standar tata kelola yang baik menuntut bahwa setiap kegiatan keuangan didokumentasikan secara rinci, dengan bukti yang lengkap dan disampaikan tepat waktu. LPJ menjadi alat formal yang menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan dan tata kelola keuangan internal perusahaan.

### Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut dan juga manajemen dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan (Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M.

(2021). Dalam konteks ini, sistem pelaporan pajak dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem informasi yang saling terhubung. Kualitas laporan pertanggungjawaban (LPJ) sangat ditentukan oleh akurasi data yang digunakan dan keandalan proses pengolahannya. Ketika data pelaporan pajak disusun dengan tepat dan lengkap, proses penyusunan LPJ pun akan berjalan lebih lancar dan efisien. Integrasi antara sistem perpajakan dan pelaporan keuangan memungkinkan terjadinya rekonsiliasi data secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat penyajian laporan yang akuntabel.

### **Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak menggaris bawahi adanya perbedaan pendekatan antara pencatatan laporan keuangan untuk tujuan komersial dan untuk keperluan perpajakan. Perbedaan ini menimbulkan selisih yang harus direkonsiliasi secara tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Ketika pelaporan pajak dilakukan dengan cermat dan tepat waktu, proses rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih efisien. Hal ini sangat membantu dalam menyusun catatan atas laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan beban pajak, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan perusahaan adalah serangkaian proses yang saling terkait yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai model keuangan perusahaan (Ratnasari, A. D., & Amiliya, S. (2024). Dalam manajemen keuangan, LPJ berfungsi sebagai dasar dalam menilai efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian tujuan program atau kegiatan. Ketika LPJ diajukan tepat waktu, perusahaan dapat segera melakukan analisis terhadap realisasi anggaran dibandingkan dengan perencanaan awal. Hal ini mempercepat siklus evaluasi dan pengambilan keputusan, serta meminimalisasi risiko administratif atau finansial. Oleh karena itu, teori tata kelola yang baik dan praktik manajemen keuangan memberikan kerangka kerja konkret untuk memahami peran LPJ dalam menunjang evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh.

### **Manajemen Risiko**

Teori manajemen risiko dalam lingkup keuangan perusahaan menekankan pentingnya mengenali dan mengendalikan berbagai potensi hambatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Salah satu risiko yang kerap muncul adalah kesalahan dalam pelaporan, yang dapat berdampak pada operasional dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Penilaian risiko adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Judijanto, at all (2025). Dalam praktiknya, ketepatan dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan termasuk kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan risiko tersebut. Pelaporan yang tepat tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan transparan. Dengan begitu, risiko reputasi akibat kelalaian dalam laporan pertanggungjawaban dapat diminimalkan, serta kepercayaan stakeholder terhadap integritas perusahaan tetap terjaga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada pengalaman langsung selama magang di Divisi Activation salah satu perusahaan swasta. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana ketepatan pengajuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) memengaruhi proses evaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam praktik sehari-hari, tanpa melalui pengolahan data kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang serta interaksi dengan karyawan yang terlibat dalam penyusunan LPJ dan pelaporan anggaran kegiatan. Penulis juga mencatat alur kerja dan kebiasaan administratif yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Temuan dianalisis secara naratif untuk melihat hubungan antara ketepatan pelaporan dan respon manajemen terhadap kinerja divisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan langsung selama pelaksanaan magang di Divisi Activation, ditemukan bahwa ketepatan dalam pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memainkan peran penting dalam proses evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Pengajuan yang dilakukan secara tepat waktu terbukti mempermudah tim manajemen dalam menilai capaian kegiatan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Divisi-divisi yang konsisten dalam pelaporan cenderung mendapatkan perhatian yang lebih baik dari manajemen, serta memperoleh umpan balik yang lebih tajam dan membangun terkait performa keuangan mereka.

Ketepatan pelaporan tidak hanya dinilai dari sisi administratif, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab divisi. Selama proses magang berlangsung, terlihat bahwa divisi yang teratur dan tepat dalam mengajukan LPJ lebih dihargai oleh manajemen, yang ditunjukkan melalui kelancaran proses persetujuan anggaran dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya. Sebaliknya, keterlambatan LPJ sering kali berdampak negatif, menghambat ritme evaluasi, bahkan berpotensi menurunkan penilaian kinerja divisi tersebut.

Selain memengaruhi persepsi, ketepatan LPJ juga berperan langsung dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Ketika laporan tersedia tepat waktu, tim manajemen memiliki waktu yang memadai untuk melakukan analisis secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis data. Berbeda halnya jika laporan masuk terlambat, analisis terpaksa dipercepat yang bisa berdampak pada ketepatan keputusan manajerial.

Dari keseluruhan pengalaman dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang tepat waktu menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem evaluasi kinerja yang sehat. LPJ bukan sekadar laporan kewajiban, melainkan alat ukur kualitas manajemen keuangan sebuah divisi. Ketepatan waktu dalam pelaporan secara tidak langsung menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan efisiensi kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas divisi di mata manajemen.

Lebih jauh, proses kerja yang diamati menunjukkan bahwa budaya kerja dan sistem internal yang rapi berkontribusi besar terhadap ketepatan pelaporan. Divisi yang memiliki prosedur dokumentasi jelas dan pengawasan internal yang konsisten lebih mampu menjaga jadwal pelaporan secara disiplin. Artinya, ketepatan LPJ bukan hanya bergantung pada teknis pelaporan, tetapi juga pada struktur organisasi, sistem kontrol, dan sikap kerja yang dibentuk secara kolektif dalam tim.

Selain itu, ketepatan pengajuan LPJ juga memberikan dampak terhadap reputasi internal divisi dalam jangka panjang. Divisi yang terbiasa bekerja dengan jadwal pelaporan yang disiplin dan konsisten akan dikenal sebagai unit yang dapat diandalkan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini

tidak hanya memudahkan koordinasi lintas departemen, tetapi juga meningkatkan peluang divisi tersebut untuk dipercaya dalam menangani proyek-proyek yang lebih besar dan strategis di masa mendatang. Ketika integritas pelaporan dijaga, maka secara otomatis divisi tersebut akan lebih siap menghadapi audit, evaluasi periodik, maupun permintaan mendadak dari manajemen, karena seluruh dokumentasi dan realisasi anggaran telah disusun dengan tertib dan tepat waktu.

Akhirnya, dari seluruh temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa LPJ yang diajukan secara tepat waktu berperan penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan. Laporan yang tersusun rapi dan lengkap memudahkan proses audit internal dan memungkinkan perbandingan kinerja antar divisi dilakukan dengan lebih objektif. Hal ini mendukung terciptanya sistem evaluasi yang adil dan profesional, serta mendorong semangat kerja yang lebih positif di lingkungan organisasi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman langsung selama magang di Divisi Activation, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung efektivitas evaluasi kinerja keuangan perusahaan. LPJ yang disusun secara tepat waktu tidak hanya memudahkan proses verifikasi dan analisis keuangan, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan, akuntabilitas, dan profesionalisme divisi pelaksana. Ketepatan pelaporan menjadi indikator penting dalam sistem tata kelola keuangan internal dan berkontribusi langsung terhadap kelancaran pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, budaya kerja yang mendukung dokumentasi rapi dan kontrol internal yang kuat terbukti mampu mendorong konsistensi dalam pelaporan.

### SARAN

Sebagai upaya meningkatkan kualitas evaluasi keuangan perusahaan, disarankan agar setiap divisi, khususnya yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan pengelolaan anggaran, membangun sistem pelaporan internal yang lebih terstruktur dan disiplin. Perlu adanya penjadwalan pelaporan yang jelas, sistem dokumentasi yang terdigitalisasi, serta mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan LPJ disusun secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, pelatihan tentang tata cara pelaporan yang efisien dan pembinaan budaya kerja berbasis tanggung jawab juga penting untuk dilakukan secara rutin. Dengan demikian, proses evaluasi kinerja keuangan dapat berlangsung lebih objektif, transparan, dan mendukung perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Titisari, K. H., & Mursito, B. (2024). Akuntabilitas Laporan Keuangan Ditinjau Dari Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Teknologi Informasi. *Jurnal AKuntansi Manado*, 5, 370-387.
- Judijanto, L., Shalihah, M. A., Desi, D. E., Kusumastuti, S. Y., Rahayu, D. H., Apriyanto, A., ... & Winarto, B. R. (2025). *Manajemen risiko*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125-1134.
- Nasution, N., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh Pemahaman Good Governance, Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor dengan Time Pressure sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4865-4876.
- Ratnasari, A. D., & Amiliya, S. (2024). Optimalisasi Keuangan Perusahaan Melalui Sistem Manajemen Keuangan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 8-15.